

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis terkait Biaya Kemacetan di kota London, Inggris, terhadap diplomat asing, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan pemerintah Inggris mengenai Biaya Kemacetan yang diterapkan kepada Diplomat Asing menurut Konvensi Wina 1961 tidak dapat disebut sebagai retribusi untuk agen diplomatik karena pemerintah tidak memberikan agen diplomatik alternatif yang realistis atau setara untuk memasuki Central London. Sebagai negara penerima, Inggris seharusnya memberikan kebebasan bergerak dan bepergian di Inggris berdasarkan Pasal 26 Konvensi Wina 1961. Dan Inggris harus memastikan bahwa agen diplomatik diberikan fasilitas penuh untuk menjalankan fungsi mereka berdasarkan Pasal 25 Konvensi Wina 1961. Biaya Kemacetan tidak memberikan layanan dan kemungkinan besar sulit bagi diplomat untuk melakukan perjalanan dengan mobil yang lebih cepat. Dengan tidak dirasakannya layanan yang diberikan, sebagaimana menurut Pasal 34 Konvensi Wina 1961, Biaya Kemacetan tidak dapat diterapkan kepada para diplomat.
2. Penerapan biaya kemacetan di Amerika Serikat, Swedia dan Singapura berbeda dengan biaya yang diterapkan di Kota London, Inggris, seperti di New York, Amerika Serikat menyatakan "pembebasan biaya kemacetan yang ditetapkan oleh Otoritas

Transportasi Metropolitan New York terhadap misi asing dan organisasi internasional tertentu. Sedangkan di Swedia, Biaya Kemacetan bukanlah biaya layanan, melainkan pajak nasional dari sudut pandang hukum. Di Singapura, Biaya Kemacetan atau disebut ERP dikecualikan dari kendaraan darurat serta kendaraan diplomatik. Dari ketiga negara tersebut para diplomat dibebaskan dari biaya kemacetan.

B. Saran

1. Biaya Kemacetan di kota London, Inggris, lebih tepat diklasifikasikan sebagai pajak karena sebagian besar diplomat tidak begitu merasakan layanan yang diberikan oleh pemerintah Inggris dalam penerapan *Congestion Charge*, sehingga hal tersebut dapat mengganggu misi diplomatik di negara penerima. Hal ini justru bertentangan dengan kewajiban negara penerima untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas agen diplomatik. Padahal, para diplomat diberikan kebebasan bergerak dan bepergian di negara penerima berdasarkan Pasal 26 Konvensi Wina 1961. Serta tidak memberikan fasilitas penuh untuk menjalankan fungsi mereka berdasarkan Pasal 25 Konvensi Wina 1961.
2. Penerapan biaya kemacetan di New York, Amerika Serikat, Swedia, dan Singapura, berbeda dengan biaya yang diterapkan di Kota London, Inggris. Negara-negara tersebut menganggap biaya kemacetan sebagai sebuah pajak yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan, dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan dan menghasilkan pendapatan guna memperbaiki

infrastruktur transportasi di kota-kota tersebut. Maka, biaya kemacetan tidak cocok diterapkan kepada para diplomat karena dapat menghambat mereka dalam menjalankan tugas dan misinya

